

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini membahas bagaimana strategi komunikasi politik Ketua DPRD dan humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial. mengenai media massa menjadi kebutuhan bagi masyarakat akan kebutuhan informasi, transfer pengetahuan, dan media komunikasi, serta menjadikan kajian tersebut sebagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Hal itu telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Pasal 7 yang artinya, kewajiban badan politik adalah untuk menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan juga dapat memanfaatkan media, berupa media elektronik ataupun non-elektronik.¹

Komunikasi merupakan salah satu hal penting dalam politik. Hubungan antara komunikasi dan politik dianggap sangat erat dan saling bergantung. Selain itu, di bidang politik, beberapa media sosial menjadi wadah keterbukaan informasi publik mengenai strategi komunikasi politik ketua DPRD dan humas untuk membangun hubungan dengan publik melalui keterbukaan informasi.² Misalnya media intsragram, web, facebook dan youtube. Metode komunikasi politik media sosial dapat memberikan wawasan tentang perilaku politik. Komunikasi politik adalah suatu strategi atau metode membangun citra politik atau berkaitan dengan suatu opini, karena opini akan muncul dari kehadiran citra politik.. Adapun komunikasi politik menjadi sebuah proses-proses penyampain ide atau gagasan sesuai dengan rancangan politik dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan akan memiliki pemahaman yang sama.³

Komunikasi politik ditujukan pada pencapaian tujuan, memungkinkan untuk mendiskusikan masalah atau memberikan informasi terkait apa yang sedang di bahas. Maka hal tesebut dapat mengikat semua masyarakat dengan penegasan sanksi yang berat, dengan adanya keputusan-keputusan tersebut melalui lembaga

¹ Rebecca Hughes, "Keterbukaan Informasi Publik," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2008): 287.

² Nyarwi Ahmad, *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

³ Mirza Shahreza, "Proses Dan Elemen-Element Komunikasi Politik," no. 893 (2018): 1–30, <https://doi.org/10.31227/osf.io/9zh46>.

politik. *Rush* dan *Altoff* menjelaskan tentang komunikasi politik, dimana proses penyampaian pesan politik yang relevan ditentukan dari satu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan hubungan antara sistem sosial dan politik.⁴ Islam juga menjelaskan tentang komunikasi politik dalam pandangan

Harjani Hefni komunikasi tersebut dibangun atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki ruh kedamaian, keramahan dan keselamatan. Berpedoman dengan asas Al-Qur'an dan Sunnah, komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan sang pencipta serta sesama untuk menjadikan komunikasi kedamaian, keramahan, serta keselamatan terhadap diri dan lingkungan dengan cara tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya.⁵ Namun berdasarkan terminologi tersebut maka dapat dipahami komunikasi Islam tidak semata sebagai sebuah praktek komunikasi yang berkiriman pesan dengan tujuan terbagunnya suatu padangan yang sama terhadap objek yang sudah di komunikasikan. Komunikasi Islam merupakan komunikasi yang bernuansa nilai-nilai Islam dalam upaya membangun kedamaian, keramahan, serta menjalin komunikasi yang harmonis terhadap sesama.

Selain itu hal tersebut mempunyai kesamaan dengan praktik humas atau *Public Relation* itu sendiri, tentang publikasi pemerintahan. Publikasi merupakan upaya humas dalam memberi informasi dan juga menciptakan pemahaman kepada publik. Mengenai uraian ini humas akan berupaya menjaga hubungan baik dengan pihak media atau *media relations*. Oleh karena itu kunci dari kesuksesan yang diperoleh sebuah instansi itu tidak lepas dari humas yang mampu menjalankan perannya dengan baik dengan manajemen tugas humas sebagai komunikator dan juga komunikasi kepada publik.

Humas adalah sebuah fungsi manajemen komunikasi, perannya menciptakan komunikasi, menciptakan hubungan dan menjalin korelasi baik antara organisasi serta publiknya, berupa pada organisasi maupun pada luar organisasi yang nantinya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan terhadap organisasi itu sendiri. Selain itu setiap instansi atau organisasi pasti membutuhkan citra positif yang baik di kalangan publik. Citra yang baik merupakan

⁵ Slvianajayanti, "مردان غير ورزشكار," *Praktik Public Relation Dalam Pandangan Islam*, n.d., 134-54.

kebutuhan suatu forum atau organisasi, maka hal ini ialah tugas yang dilakukan oleh humas melalui program humas.⁶

Sedangkan komunikasi politik ialah hal yg sangat krusial terhadap proses korelasi antara komunikator dengan komunikan. komunikasi politik juga disebut sebagai jalannya suatu pemerintahan yg sangat erat dengan aktifitas sosial, serta membantu dalam perolehan dukungan serta integrasi politik, diantaranya melalui media sosial, pula berkaitan erat adanya kampanye, propaganda, retorika politik, perundingan , serta pembentukan opini publik.⁷ Sehingga melalui komunikasi politik Humas dalam memeberikan informasi kepada masyarakat merupakan hal sangat penting dalam mempengaruhi polapikir masyarakat tentunya dalam berkomunikasi terhadap jalannya pemerintahan.

Gabriel Almon menjelaskan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. sedangkan dalam penyampaianya Politik merupakan sebuah proses dimana penyampaian pesan yang berlangsung dalam enam fungsi , diantaranya yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, Ekspresi minat, agregasi minat, pembuatan aturan, aplikasi Aturan peraturan dan peraturan. Dapat ditarik kesimpulan fungsi komunikasi politik melekat pada setiap fungsi sistem politik itu sendiri,⁸ Seperti halnya humas atau *public relations* dewan perwakilan rakyat dalam membangun citra postif DPRD di media sosial, dengan adanya sistem komunikasi politik yang melekat kepada publik. Sehingga humas atau publik relation sebagai yang mewedahi adanya sebuah komunikasi di dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan demi membangun komunikasi yang baik, maka humas DPRD Kabuapten Demak yang menjalankan jalannya komunikasi antara DPRD dengan publik atau masyarakatnya.

Menurut Howard Bonham dalam bukunya “*Public Relations Perusahaan*” mendevinisikan bahwa *public relations* sebagai strategi untuk menciptakan pengertian publik yang lebih banyak sehingga dapat memperbesar kepercayaan publik terhadap seseorang maupun organisasi.⁹ Mengenai hal tersebut strategi komunikasi

⁶ Ayu Oktarina, “Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Positif Dprd Kabupaten Rejang Lebong,” 2019, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/482/1/STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG.pdf>.

⁷ Shahreza, “Proses Dan Elemen-Element Komunikasi Politik.” 1-5.

⁸ P and Ali Muhyidin, “Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik,” *Pendekatan Dalam Analisis Sistem Politik* 1, no. Februari (2013): 1–34.

⁹ Pujiyanto Arif , “Peran Humas Dalam Pelayanan Keluhan,” 2020. n.d., 1–102.

humas DPRD Kabupaten Demak dalam mewujudkan citra positif dimedia sosial sangat berpengaruh terhadap jalannya informasi terkait hubungan baik terhadap komunikan dengan tujuan mewujudkan citra positif DPRD.

Selain itu dari Nandini, humas (*public relations*) sebagai komunikasi yang harus menggunakan komunikasi timbal balik dalam aktivitas kesehariannya, selain itu dalam mencapai tujuan organisasi, juga harus terhidar dari beberapa konflik yang mungkin terjadi. yang nantinya akan menimbulkan sebuah itikad baik (*good will*) dan dukungan demi terciptanya citra positif (*good image*) bagi lembaga atau organisasi. humas atau public relations memiliki peran dan tugas yang penting untuk menjalin hubungan dengan publik baik internal maupun eksternal dalam suatu perusahaan, lembaga ataupun kantor pemerintahan. Terhadap beberapa kualifikasi *publik relation* atau humas menurut Jefkins berupa kemampuan berkomunikasi (*Ability to communicate*), kemampuan berorganisasi (*Ability organize*), kemampuan membangun relasi (*Ability to get with people*), kepribadian untuh atau jujur (*personal Intregity*), dan memiliki imajinasi yang kuat (*imagination*).¹⁰

Humas pemerintah merupakan divisi humas millik Negara. Bertugas di pemerintahan pusat ataupun daerah yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Humas pemerintahan adalah lembaga pemerintahan yang non profit atau lembaga yang mendukung suatu tujuan pemerintahan yang sejahtera. Selain itu kegiatan humas sendiri yakni melayani masyarakat menciptakan informasi dan komunikasi secara terbuka dengan publik maupun media. dari hal tersebut strategi komunikasi politik humas sangatlah penting untuk menumbuhkan citra positif kepemerintahan DPRD melalui media sosial.

Menurut Haenlein, media sosial adalah media online yang berbasis internet. Penggunaanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten atau opini, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blong, jejaring sosial, dan wiki adalah media sosial yang umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengartikan media sosial sebagai "satu set aplikasi berbasis Internet yang

¹⁰ Haeril Haeril, Mas'ud Mas'ud, and Taufik Irfadat, "Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi Pada Dprd Kabupaten Bima)," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 2, no. 2 (2020): 153.

dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 dan mampu menciptakan dan bertukar konten yang dibuat pengguna".¹¹

Mengenai pengertian -pengertian diatas penulis dapat mengerti, memahami tentang apa saja aktivitas seorang humas atau *public relations* dalam tugas-tugasnya, bahwa dalam pekerjaan yang dimiliki humas atau *public relations* itu tidaklah mudah. Beban yang dimiliki humas ataupun *public relations* sebagai ujung tombak suatu organisasi atau perusahaan pasti memiliki banyak permasalahan, maka aktivitas-aktivitas humas atau *public relations* sangatlah berpengaruh terhadap jalannya kesuksesan. Untuk itu menjadi sangat penting bagi penulis untuk meneliti Fungsi Humas dalam menjaga citra dan Kinerja DPRD Kabupaten Demak, mengingat sangat krusialnya peran humas dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi sekaligus citra positif di mata publik di tengah degradasi kepercayaan masyarakat Kabupaten Demak pada Pemerintah terutama pada Lembaga Legislatif. Selain itu faktor-faktor yang menghambat jalannya komunikasi politik juga meng-counter issue berita (hoax) dan juga permasalahan teknis terkait dengan jaringan internet lembaga DPRD yang sering mengganggu dalam proses peng-uploadan informasi-informasi di media sosial. Adapun dengan hal tersebut maka peneliti ingin menganalisis dan menjelaskan lebih mendalam terkait peran dan fungsi Humas DPRD Kabupaten Demak.

Mengenai uraian tersebut apabila suatu perusahaan, kantor pemerintahan atau lembaga menghadapi suatu krisis ataupun permasalahan, maka orang-orang yang bekerja di bagian humas atau *public relations* sendiri adalah pihak yang pertama, biasanya dimintai keterangan dari publik eksternal. oleh sebab itu seorang humas atau *public relations* di dalam kesehariannya dituntut bukan hanya pintar berada didalam keadaan apapun, tetapi pintar dalam menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan oleh banyak pihak secara hati-hati dan benar.¹²

Pentingnya humas atau *public relations* DPRD dalam membangun citra positif di media sosial, dengan tujuan untuk mempermudah instansi pemerintahan. khususnya pemerintahan DPRD Kabupaten Demak dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang telah mereka lakukan, seperti halnya penyebaran informasi kebijakan, penyerapan aspirasi

¹¹ Nurul Istiani and Athoillah Islamy, "Fikih Media Sosial Di Indonesia," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 202–25.

¹² E R Onainor, "Peran Humas Pada Organisasi" 1 (2019): 105–12.

masyarakat, dan sosialisai-sosialisasi mengenai peraturan atau kegiatan yang telah di sepakati oleh bupati dan publik.

DPRD Kabupaten Demak dalam pelaksanaan kinerja humas atau *public relations*, merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam lingkup pemerintah kabupaten atau kota. Kinerja *public relations* dalam suatu Pemerintah biasanya membantu pelaksanaan program pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang menjadi target pemerintah. Menurut survey lapangan, tugas Humas DPRD Kabupaten Demak adalah menerima surat apapun dari DPRD, misalnya DPRD lain ingin berkunjung ke DPRD Kabupaten Demak, kemudian tugas Humas adalah menjadwalkan pertemuan. membuat jadwal acara, seperti sidang pleno, dan bangun profil atau citra pemerintahan.

Strategi yang dilakukan Humas tidak hanya dapat memperoleh kepercayaan publik dan memperoleh citra positif, namun citra positif yang telah terbangun perlu ditingkatkan, karena berdampak besar terhadap reputasi pemerintah, jika reputasi pemerintah tidak baik, maka kepercayaan masyarakat akan hilang, selain itu jika dipudarkan dengan reputasi negatif maka akan sulit bagi pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Humas memainkan peran pentingnya dalam membentuk citra pemerintah. Dilihat dari kinerjanya, humas telah bekerja sangat keras dalam menjaga citra pemerintah, dan peran humas dalam membangun citra adalah dari upaya peningkatan dan pemeliharaan citra hingga upaya peningkatan citra pemerintah.¹³

Studi pada penelitian ini akan mengkaji tentang komunikasi politik terhadap strategi komunikasi Ketua DPRD dan Humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial. Humas atau *public relations* sendiri memiliki peran untuk menjalankan keluar masuknya informasi antara pihak dalam dan pihak luar, humas yang bertanggung jawab tentang apa saja informasi yang perlu diketahui dengan baik dan benar oleh masyarakat tentang kebijakan-kebijakan baru atau kegiatan-kegiatan dewan yang sudah dilakukan tanpa menimbulkan adanya kesalah pahaman penerimaan antara masyarakat dengan kantor pemerintah itu sendiri. Selain itu komunikasi politik adalah salah satu proses seorang komunikator menyampaikan atau memberi pesan kepada komunikan melalui media sosial atau secara langsung yang menimbulkan akibat atau pengaruh terhadap orang lain.

¹³ Ahmad, "Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik".Pustaka Zaman: Yogyakarta , 1-20

Dasar-dasar komunikasi adalah sebuah aktivitas Komunikasi, diartikan dengan pertukaran ide atau pemikiran secara sederhana. kegiatan ini dapat kita pahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan terhadap seseorang atau sekelompok orang, bertujuan agar menghasilkan kesempatan bersama terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Seperti yang di kemukakan Thomas M. Scheiwadael dalam bukunya Mulyana¹⁴ terlihat bahwa berkomunikasi merupakan proses untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membuka, berjejaring sosial terhadap orang sekitar dan mempengaruhi orang lain dalam betingkah, berfikir, dan berperilaku seperti halnya uang di inginkan.¹⁵

Berbicara tentang perkembangan politik saat ini harus menjadikan ketua DPRD dan humas DPRD kota/kabupaten sebagai keterwakilan daerah terhadap jalannya pemerintahan khususnya di Kabupaten Demak. Menurut peneliti tema ini sangatlah penting dibahas dan dikaji sebab memiliki signifikan terhadap jalannya pemerintahan yang sebenarnya, terutama pada strategi komunikasi politik humas dalam membangun citra positif DPRD di media sosial.

Kredibilitas kinerja perangkat daerah adalah keharusan terhadap jalannya informasi melalui media sosial. Hal itu terkontibusi dari tingkat transparasi dan akuntabilitas kerja institusi. Begitupun dengan kredibilitas kinerja perangkat daerah, yang terukur dari tingkat transparasi dan akuntabilitas kinerja. Maka dari hal tersebut menjelaskan bahwa Strategi Komunikasi Politik Ketua DPRD dan Humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial sangatlah penting untuk menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD Kabupaten Demak. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat sangat diutamakan, agar terjalin komunikasi yang baik antara lembaga dengan masyarakat.

Adapaun dengan adanya media sosial kita dapat menyadari dan mengetahui pentingnya posisi media sosial dalam kegiatan humas pemerintah sekretariat DPRD Kabupaten Demak, maka peneliti memfokuskan penelitian untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi politik Ketua DPRD dan humas DPRD dalam membangun citra positif DPRD, Pertama, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel hubungan fungsional yang dibangun oleh

¹⁴ Mirza Shahreza, "Pengertian Komunikasi Politik," 2018, 1–25, <https://doi.org/10.31227/osf.io/v48x2>. 2018, 1-25

¹⁵ Mulyana "pengertian komunikasi terhadap politik," sejarah Singkat Java 1991..

Humas DPRD Kabupaten Demak. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan sebagai sub-sistem antara Humas DPRD Kabupaten Demak dengan Publik. berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam yang di tuangkan dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul **“Strategi Komunikasi Politik Ketua DPRD dan Hubungan Masyarakat DPRD Kabupaten Demak dalam Membangun Citra Positif DPRD Di Media Sosial.**

B. Fokus Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian yang mengutamakan pada kekuatan narasi dan *deskriptif*, selain itu untuk memudahkan terhindar terjadinya salah pengertian terhadap peneliti maka diberikan pengertian dan batasan masing-masing argument penelitian. Pendekatan kualitatif yaitu pengalihan data untuk memahami permasalahan terutama pada masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, di dapat dalam situasi yang alami. Sedangkan penetapan penelitian merupakan tahapan yang sangat penting terhadap penelitian kualitatif.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Ketua DPRD dan hubungan Masyarakat DPRD dalam menumbuhkan citra positif DPRD di media sosial, tentang penyampaian informasi, pesan dan peraturan-peraturan pemerintahan terhadap masyarakat publik. Terutama pada pembentukan informasi yang baik, hubungan timbal balik antara humas DPRD dengan masyarakat publik. Pada dasarnya setiap humas pemerintahan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menumbuhkan citra positif DPRD itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah adalah tulisan yang berupa pertanyaan atau permasalahan yang nantinya dikaji dalam penelitian ini sesuai dengan identifikasi peneliti. Diantaranya ada 4 hal rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Ketua DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial?
2. Bagaimana strategi komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial?.
3. Bagaimana isu-isu islam ditampilkan humas dalam menumbuhkan citra positif DPRD di media sosial?.

4. Faktor apa yang menghambat dari Komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di medi soaial?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang sudah di angkat maka tujuan penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi Ketua DPRD dalam membangun citra positif DPRD di media sosial.
2. Untuk mengetahui strategi komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung strategi humas dalam mebangun citra positif DPRD di media sosial khususnya di Kabupaten Demak.
4. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif di media sosial.

E. Manfaat Penelitian

Pada skripsi ini diharapkan dapat memeberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. *Pertama*, secara akademis sebagai sarana pengembangan ilmu politik , terutama pada program pemikiran politik islam yang berkaitan dengan fokus pemebelajaran.

Adapun hasil dari penelitian ini diharap dapat berguna dan memberikan sumbagan pemikiran terhadap proses Ketua DPRD dan humas dalam membangun citra positif DPRD di media sosial. Terutama bisa menjadi kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang ilmu politik. *Kedua*, Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain khususnya bagi pembaca, dan bagi peneliti berikutnya, sedangkan bagi strategi komunikasi politik Ketua DPRD dan humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial tentu dapat menjadikan kemajuan disetiap tahunnya. Dari beberpa uraian tersebut sangat penting untuk menjalin sebuah komunikasi publik, melalui media sosial kita dapat mendapat informasi, berita, pesan dengan mudah dan cepat .

F. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika penulisan skripsi ini maka peneliti susun terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi. Hal tersebut dilakukam agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang

akan penulis susun atau penelitian yang akan dibahas, adapun pembagian mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari tiga bab, dari bab pertama sampai bab akhir harus saling berhubungan karena di setiap bab tersusun akan pembahasan satu kesatuan yang utuh. Untuk ketiga bab tersebut meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama menjelaskan latar belakang atau uraian penelitian, mengenai hal tersebut dapat di uraikan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan menjelaskan tentang deskripsi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang sedang di kaji. Kerangka teori akan memaparkan teori tentang Strategi Komunikasi Politik, ketua DPRD dan Humas, Publik relation, Citra Positif, Media Sosial. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis kaji, serta sebagai kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian ini peneliti memaparkan tentang jenis dan pendekatan peneliti terhadap apa yang dikaji oleh peneliti, sebagai pendekatan peneliti. Seting peneliti berupa lokasi dan waktu penelitian dilakukan. Kemudian berupa subjek penelitian yang berlaku sebagai refrensi utama dalam memperoleh data untuk penelitian ini. Untuk itu, metode penelitian merupakan penjelasan mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahandata, dan teknik dalam analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang strategi komunikasi politik humas DPRD Kabupaten Demak dalam membangun citra positif DPRD di media sosial.

BAB V : Penutup

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dikaji dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis kepada pembaca untuk menyelesaikan masalah penelitian.

